

ABSTRACT

Mulia Putri Fisabillilah, Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Djuanda Bogor, 2021, Implementation of PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions) Policy in Breaking the Chain Spread of Covid-19 in West Bogor District, 1st Supervisor: R Akhmad Munjin, Drs., M.Sc., 2nd Supervisor: Ginung Pratidina, Dra., M.Si.

The increasing of Covid-19 in Indonesia has made the government issues a policy; in 2021, the Bogor City Government issued a policy including the Micro-Based PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions) in the context of controlling Covid-19 in Bogor City, the PPKM policy was issued through The Bogor Mayor Regulation Number 7 of 2021. The West Bogor District Government in an effort to stop the spread of Covid-19 follows the direction of the central government, implementing Micro-Based Community Activity Restrictions (PPKM). Some of the problems that occur now, namely the West Bogor District area, there are still many people who have been confirmed positive for Covid-19. Other problems are communication problems that often occur such as conveying policies to the public that do not run smoothly due to people's background factors who do not understand and do not have access to communication through WhatsApp. In addition to the media factor in communication, the age factor also affects the communication provided by the officer cannot be understood properly, people with old age find it difficult to understand the course of the policy. The next problem is resource, assistance for facilities, and infrastructure that sometimes experience obstacles. The case of Covid-19, which is national and broad in nature, makes the assistance that comes down experience problems, such as assistance for spraying disinfectants in community areas. This stalled assistance, people choose to make an disinfectant independently with other communities, the formulation of the problem in this study is how is the implementation of micro PPKM policies in West Bogor District?, how are the obstacles in implementing micro PPKM policies?, and how are efforts to overcome obstacles in the implementation of micro PPKM?.

The purpose of this study was to determine the implementation of micro PPKM policies in West Bogor District, to find out the obstacles in implementing micro PPKM policies, to find out efforts to overcome obstacles in implementing micro PPKM policies.

The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach.

The results showed that the implementation of the Micro-Based PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions) policy in breaking the chain of the spread of Covid-19 in West Bogor District had been going well, which based on the results of the data recapitulation, had an average value of 4.00 with the criteria of Good. Members of the Covid-19 handling task force in West Bogor Sub-district carry out policies well as evidenced by regularly holding coordination meetings every 2 weeks attended by members of the standby local community task force with the local authority, holding a for socialization and reminding the public every week for the implementation of the policy. Effective PPKM in West Bogor District, information on coordination of every case from the local community and local authority, once a week monitoring from the local authority task force, an appeal from the local community for Covid-19 alerts to the community every day, and additional information via social media WhatsApp. Even though there are still obstacles, such as people who still violate health protocols and do not believe in the existence of Covid-19 and the saturation of the community due to Covid-19 that never goes away, they start to ignore the applicable policies.

The conclusion of the study is that the implementation of the micro-based PPKM policy (Enforcement of restrictions on community activities) to break the chain of the spread of Covid-19 in West Bogor District has been carried out well. Based on the results of the data recapitulation as a whole has an average value of 4.00 with the following criteria: Good. Several obstacles in its implementation, such as some people still do not believe in the existence of the Covid-19 virus, carrying out health protocols such as wearing masks not for their own health but to avoid reprimands from officers, some people do not fully understand PPKM policies, especially the elderly, the existence of Covid-19 which takes too long to make people no longer comply with PPKM policies, miscommunication between officers sometimes occurs. Efforts made to overcome obstacles in implementing the micro-based PPKM policy (Enforcement of restrictions on community activities) to break the chain of the spread of Covid-19 in West Bogor District are continuous socialization to the community, always advising and providing advice to always comply with PPKM policies, also educate the public and stop the spread of the virus, coordination meetings with local community every 2 weeks are set for monitoring and attended by the local authority task force, once a week to spray disinfectant.

Suggestions that can be put forward in this study are that it is hoped that the members of the Covid-19 task force in West Bogor District will always be alert and will never be bored in educating the public about the dangers of Covid-19 and the importance of complying with policies that have been issued by the government such as the PPKM policy (Enforcement of restrictions on community activities) on a micro scale. Add more community outreach using group communication media on WhatsApp input community numbers so that the information conveyed goes directly to the people's hands.

Keywords: Implementation, Policy, Enforcement of Restrictions on Community Activities, Micro, District.



ABSTRAK

Mulia Putri Fisabilillah, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor, 2021, Implementasi Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berskala Mikro Dalam Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Pada Kecamatan Bogor Barat, Pembimbing I : R. Akhmad Munjin, Drs., M.Si., Pembimbing II : Ginung Pratidina, Dra., M.Si.

Pertumbuhan Covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan sebuah kebijakan di antaranya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berbasis Mikro dalam rangka pengendalian Covid-19 di Kota Bogor, kebijakan PPKM dikeluarkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021. Pemerintah Kecamatan Bogor Barat dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 mengikuti arahan dari pemerintah pusat, penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berbasis Mikro. Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan saat ini yaitu wilayah Kecamatan Bogor Barat masih banyak masyarakatnya yang terkonfirmasi positif Covid-19, permasalahan lainnya yaitu Permasalahan komunikasi yang sering terjadi seperti penyampaian kebijakan kepada masyarakat tidak berjalan lancar karena faktor latar belakang masyarakat yang tidak mengerti dan tidak mempunyai akses komunikasi via Whatsapp, selain faktor media pada komunikasi, faktor usia juga mempengaruhi komunikasi yang diberikan petugas tidak bisa dipahami dengan baik, masyarakat dengan umur lanjut usia sulit memahami jalannya kebijakan. Permasalahan selanjutnya permasalahan tentang sumber daya, bantuan sarana dan prasarana yang turun terkadang mengalami hambatan, kasus Covid-19 yang bersifat nasional dan luas menjadikan bantuan-bantuan yang turun mengalami kesendatan seperti bantuan untuk penyemprotan disinfektan wilayah masyarakat, karena bantuan yang tersendat ini masyarakat memilih untuk membuat disinfektan mandiri dengan swadaya dengan masyarakat lain, rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi kebijakan PPKM mikro pada Kecamatan Bogor Barat, kedua, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM mikro, dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PPKM mikro.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PPKM mikro pada Kecamatan Bogor Barat, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM mikro, untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM mikro.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berskala Mikro dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 Pada Kecamatan Bogor Barat telah berjalan dengan baik yang berdasarkan hasil rekapitulasi data secara keseluruhan mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,00 dengan kriteria nilai Baik. Anggota satuan tugas

penanganan Covid-19 pada Kecamatan Bogor Barat melaksanakan kebijakan dengan baik dibuktikan dengan rutusnya mengadakan rapat koordinasi setiap 2 minggu sekali yang dihadiri oleh anggota satgas tingkat RW siaga dengan Kelurahan, mengadakan wawar keliling untuk sosialisasi dan mengingatkan masyarakat setiap minggu nya demi berjalannya kebijakan PPKM pada Kecamatan Bogor Barat yang efektif, info koordinasi setiap ada kasus dari RW dan Kelurahan, seminggu sekali mengadakan monitor dari gugus tugas kelurahan, himbuan dari RW siaga covid kepada masyarakat setiap harinya, dan informasi-informasi tambahan melalui media sosial Whatsapp. Walaupun masih terdapat hambatan-hambatan seperti masyarakat yang masih ada melanggar protokol kesehatan dan belum mempercayai adanya Covid-19 dan kejenuhan masyarakat karena Covid-19 yang tak kunjung pergi membuat mereka mulai mengabaikan kebijakan yang berlaku.

Kesimpulan dari penelitian adalah pelaksanaan Implementasi kebijakan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) berskala mikro untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 pada Kecamatan Bogor Barat telah di jalankan dengan baik, yang berdasarkan hasil rekapitulasi data secara keseluruhan mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,00 dengan kriteria nilai Baik. Beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti beberapa masyarakat masih tidak percaya akan keberadaan virus Covid-19 ini, menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker bukan demi kesehatan diri sendiri tetapi demi menghindari teguran petugas, beberapa masyarakat belum sepenuhnya memahami kebijakan PPKM terutama para lansia, keberadaan Covid-19 yang terlalu lama membuat masyarakat tidak mematuhi lagi kebijakan PPKM, miskomunikasi antar petugas terkadang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi kebijakan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) berskala mikro untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 pada Kecamatan Bogor Barat adalah Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat, selalu menasehati dan memberikan saran agar selalu mematuhi kebijakan PPKM juga mengadakan wawar keliling untuk mengedukasi masyarakat dan memutus penyebaran virus, rapat koordinasi RW siaga 2 minggu sekali ditetapkan untuk monitor dan dihadiri juga oleh gugus tugas Kelurahan, seminggu sekali untuk semprot disinfektan.

Saran yang bisa diajukan dalam penelitian ini adalah Diharapkan kepada anggota satgas covid-19 pada Kecamatan Bogor barat untuk selalu siaga dan tidak akan pernah bosan dalam mengedukasi masyarakat perihal bahayanya Covid-19 dan pentingnya mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti kebijakan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) berskala mikro. Tambahkan lagi sosialisasi masyarakat dengan menggunakan media komunikasi grup pada Whatsapp (WA) masukan nomor-nomor masyarakat agar informasi yang disampaikan langsung ke tangan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Mikro, Kecamatan.